

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan yang mendorong usaha pembangunan bangsa dan negara adalah perbaikan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000).

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan kompleks yang terus menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan di Indonesia. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, intervensi pemerintah telah bergeser dari sekadar bantuan amal (*charity*) menjadi program pemberdayaan (*empowerment*). Salah satu wujud nyata dari intervensi ini adalah penyaluran bantuan sosial Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program ini dirancang sebagai stimulus modal bagi masyarakat prasejahtera untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan usaha mikronya agar mampu mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Sebagai landasan pelaksanaannya Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.

Program ini adalah salah satu bentuk nyata bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau kelompok usaha bersama sebagai wujud perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Fokus utamanya adalah membantu meningkatkan penghasilan, mendorong terciptanya kesejahteraan, serta mempercepat upaya pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Di tingkat daerah, komitmen ini diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Balangan melalui penetapan Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif. Berdasarkan regulasi tersebut, program UEP dirancang sebagai stimulus

modal bagi masyarakat prasejahtera untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan usaha mikronya agar mampu mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Balangan secara aktif telah mengimplementasikan program ini sebagai bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM. Pada tahun anggaran 2024, bantuan UEP telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai kecamatan, di mana khusus untuk wilayah Kecamatan Juai terdapat 39 KPM yang menjadi sasaran program. Komitmen ini terus berlanjut pada tahun 2025, di mana Pemerintah Kabupaten Balangan kembali meluncurkan bantuan serupa secara serentak di delapan kecamatan, yakni Juai, Awayan, Paringin, Paringin Selatan, Batumandi, Halong, Tebing Tinggi, dan Lampihong.

Secara spesifik di Kecamatan Juai pada tahun 2025, program UEP menyasar 26 KPM dengan total alokasi dana bantuan mencapai Rp72.000.000. Setiap KPM menerima bantuan modal usaha sebesar Rp3.000.000 yang dialokasikan untuk jenis usaha yang berbeda-beda. Pemerintah daerah sangat berharap bahwa suntikan modal ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima untuk mengembangkan kapasitas usahanya. Secara jangka panjang, pengembangan usaha ini ditargetkan mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan pendapatan harian dan perbaikan taraf kesejahteraan keluarga penerima. Berikut jumlah data penerima bantuan sosial Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2024-2025 di Kecamatan Juai:

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Tahun 2024-2025 di Kecamatan Juai

NO	TAHUN	JUMLAH (KPM)	TOTAL BANTUAN
1	2024	39	Rp. 97.500.000
2	2025	26	Rp. 72.000.000

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Balangan)

Faktanya harapan dan tujuan ideal dari program tersebut seringkali berbenturan dengan realitas di lapangan. Berdasarkan fenomena yang terjadi

pada KPM di Kecamatan Juai, terdapat berbagai kendala krusial yang mengancam keberlanjutan usaha mereka. Pertama, ditemukan adanya usaha khususnya pada sektor usaha makanan dan minuman yang tidak dapat berjalan dengan baik bahkan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk, sehingga usaha-usaha tersebut sulit berkembang dan berakhir tutup. Kedua para pelaku usaha dihadapkan pada fluktuasi perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga bahan baku dan persaingan semakin ketat bagi penerima bantuan cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan. Ketiga Masyarakat yang menjalankan usaha jasa jahit di Kecamatan Juai mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena terbatasnya modal. Kendala modal ini menyebabkan mereka tidak mampu membeli berbagai macam alat kerja, sehingga berdampak langsung pada kemampuan usaha untuk berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Untuk mengetahui sejauh mana intervensi Pemerintah Kabupaten Balangan ini berdampak nyata di tengah berbagai masalah tersebut, diperlukan sebuah analisis yang komprehensif. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas akan dibedah menggunakan teori efektivitas dari J.P. Campbell. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya melihat apakah input (dana Rp3.000.000/KPM) sudah disalurkan, tetapi juga mengevaluasi apakah sasaran program merasa terbantu, dan sejauh mana program ini benar-benar efektif mewujudkan tujuan akhirnya: keberlanjutan usaha KPM di Kecamatan Juai.

Berdasarkan uraian fenomena dan landasan teoretis di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian kuantitatif yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah berjudul: “Analisis Efektivitas Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap Keberlanjutan Usaha Masyarakat Prasejahtera di Kecamatan Juai.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mampu membantu keberlanjutan usaha masyarakat prasejahtera

di Kecamatan Juai?

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara efektivitas pemberian bantuan UEP terhadap keberlanjutan usaha masyarakat prasejahtera di Kecamatan Juai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam membantu keberlanjutan usaha masyarakat prasejahtera di Kecamatan Juai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara efektivitas pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap keberlanjutan usaha masyarakat prasejahtera di Kecamatan Juai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran UEP di Kecamatan Juai, serta mengidentifikasi aspek sistem yang memerlukan perbaikan di tahun-tahun mendatang agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
- b. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha mereka sehingga, dapat mendorong kesadaran pelaku usaha mikro mengenai pentingnya pengelolaan modal yang efektif di tengah tantangan ekonomi eksternal.
- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori ekonomi mikro dan kebijakan publik, serta mengasah ketajaman analisis dan empati terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat prasejahtera. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mengimplementasikan teori ekonomi mikro dan

kebijakan publik, serta mengasah ketajaman analisis dan empati terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat prasejahtera.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian teoretis mengenai efektivitas program bantuan sosial berbasis pemberdayaan, seperti UEP, dalam mendorong kemandirian masyarakat prasejahtera. Selain itu, penelitian ini menyajikan bukti empiris terkait faktor-faktor penentu keberlanjutan usaha di kelompok ekonomi terbawah (*bottom of the pyramid*), seperti ketepatan sasaran, besaran dana, dan kualitas pendampingan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dasar sekaligus bahan pembandingan bagi akademisi yang tertarik meneliti kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan maupun tingkat Kecamatan.

